

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KAWASAN EKS LOKALISASI

DOLLY SURABAYA

Arini Sulistyowati
Universitas Wijaya Putra
arinisulistyowati@uwp.ac.id

Dwi Wahyu Prasetyono
Universitas Wijaya Putra
dwiwahyu@uwp.ac.id

Abstract

This research was intended to identify community empowerment program for the ex "Dolly" localization, Surabaya to the development of empowerment models which are effective for the affected communities of the localization. The closure of the localization of in surabaya (and some other cities) left behind problems on the affected communities (fuel price hike worried investors localization of extricating a person who begins) who termarginalize from the economic life of cause have lost employment opportunities. Needed capable of bridge empowerment intermediate profession affected communities on a new job in normal life.

Empowerment is the provision of capacity to target that can and able to solve the matter in more independent. Public empowerment be able run well and be more successful if the group seen as collective the community target. On that perspective be related to be concerned with community ecology context, where success empowerment also determinated by intervation of the concerned with character of society. Institutional ecology perspective allows the development of partisipatori of subjects in empowerment process.

The research is qualitative study was conducted within the framework of post positivist paradigm. Approach that is used is phenomenology, intended capturing reality and meaning, and reveal that is behind the empowerment process to the people who affected communities of the cover-up were "Dolly" localization. The results of the analysis data expected to model empowerment to develop effective in the localization affected communities in particular.

Keywords: *Empowerment, Institutional Community Ecology, Closures, Localization*

I. Pendahuluan

Berdasarkan pada payung hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan/ tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi di wilayah kota Surabaya. Dolly yang merupakan kawasan lokalisasi terbesar, secara resmi ditutup mulai tanggal 18 Juni 2014. Tindak lanjut pasca penutupan kawsan lokalisasi Dolly, diluncurkan berbagai program pemberdayaan

kepada masyarakat terdampak, yang diharapkan menjadi bekal untuk kembali ke kehidupan normal. Banyak pihak yang sebelumnya menggatungkan nafkah hidupnya dari perputaran ekonomi lokalisasi, pasca penutupan lokalisasi Dolly mereka itu menjadi termarginalisasi dan kehilangan lapangan pekerjaan. Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat terdampak diharapkan dapat menumbuhkan alih profesi pada mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*society oriented development*) (Prasojo, 2013) atau pembangunan yang dikendalikan masyarakat (*community driven development*) (Wrihatnolo dan Dwdjowijoto, 2007: 431), dimana sumber ide, proses dan hasil pembangunan sejalan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Kompleksitas pemberdayaan pada dimensi pendekatan, salah satunya adalah pada sisi tingkatan (Reininger, et al, 1999), yaitu meliputi pemberdayaan pada tingkat individu dan kolektif (Cheung, et al, 2005). Pemberdayaan pada tingkat kolektif akan meliputi pemberdayaan tingkat organisasi dan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 80; Reininger, et al, 1999; Kasmel dan Andersen, 2011). Dimana pada ketiga tingkatan pemberdayaan itu memiliki hubungan erat, dalam pemberdayaan masyarakat akan terdapat pemberdayaan organisasi, dan dalam pemberdayaan organisasi akan bergantung pada tingkat pemberdayaan (individu) anggotanya (Zimmerman, 2000 dalam Kasmel dan Andersen, 2011). Dalam pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep pemberdayaan (sebagai proses) dan keberdayaan (sebagai hasilnya) dalam kontek masyarakat, yang merujuk pada kemampuan individu-individu manusia yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 75).

Pentingnya pemahaman terhadap konsep pemberdayaan dan pelaksanaan pemberdayaan pada kontek kelompok atau kolektif, karena keberdayaan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat selain dipengaruhi oleh intervensi pemberdayaan juga karena karakter kelompok atau masyarakat secara menyeluruh (Sjafari, 2010). Dalam perspektif demikian konteks pemberdayaan tidak akan lepas dari konsep ekologi manusia dan ekologi kelembagaan masyarakat, dimana kemampuan manusia untuk bertahan hidup adalah dengan menyesuaikan diri dengan dan mengembangkan ekologi dimana mereka hidup. Teori ekologi manusia, juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat, mulai dari keluarga, dibentuk nilai yang merupakan konsepsi manusia tentang apa “yang baik”, “yang benar” dan “yang bermanfaat” dalam kehidupan. Nilai-nilai diwariskan secara tutun-temurun kepada generasi yang lebih muda, karena nilai-nilai itu merupakan bagian integral dari proses kehidupan. Nilai ideologis, norma, dan pola institusional yang luas dari budaya tertentu yang ada pada ekologi manusia membentuk "cetak biru" ekologi budaya pengembangan manusia (Bubolz dan Sontag:1993, 423).

II. Landasan Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan isu yang menarik, dalam prosesnya seringkali dikaitkan pada pembangunan yang bersumber pada manusia. Di sisi lain, istilah pemberdayaan banyak digunakan oleh elite politik sebagai legitimasi program-program

kebijakannya. Seakan-akan setiap program kebijakan yang dilaksanakan mengandung unsur pemberdayaan. Padahal, pemberdayaan tidaklah sekedar memberikan kemampuan kepada penyandang masalah agar dapat hidup secara wajar dan selayaknya. Namun lebih dari itu, pemberdayaan memberikan mereka pengalaman belajar yang berorientasi pada proses bukan hasil semata (Soetomo, 2011). Menurut Sumpeno (2011) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2010). Pemberdayaan menjadi salah satu unsur pembangunan manusia seutuhnya yang mengedepankan kesetaraan bersifat berkelanjutan dan mendorong peningkatan produktifitas. Mardikanto dan Soebiato (2015) menawarkan konsep dasar pemberdayaan sebagai pembangunan yang berpusat pada rakyat. Artinya, setiap upaya pemberdayaan diarahkan pada individu atau masyarakat sehingga mereka dapat kembali berfungsi sosial secara mandiri dalam lingkungannya.

Sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas) (Mardikanto dan Soebiato, 2015). Dalam pelaksanaan pemberdayaan perlu memperhatikan berbagai hambatan struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidak-adilan, yang membatasi kesempatan individu untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka di masyarakat, karenanya pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan akses mereka terhadap alat kekuasaan dan pengaruh di masyarakat (Jönsson, 2010).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki muatan belajar sosial. Disebut demikian, sebab pemberdayaan dipandang sebagai upaya yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan demi mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik (Soetomo, 2014). Lebih lanjut Soedjatmoko dalam Soetomo (2014) menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan manusia tersebut merupakan bentuk manifestasi dari interaksi manusia dengan lingkungannya, baik yang bersifat alam maupun sosial, selain itu dipahami sebagai respon masyarakat terhadap adanya tuntutan perubahan dan perkembangan yang merupakan keniscayaan. Perlu diingat kembali, bahwa pemberdayaan cenderung pada proses bukan hasilnya, oleh karena itu dipahami sebagai siklus dari tindakan satu ke tindakan lainnya yang merupakan dinamika belajar sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sumodiningrat (2009) pemberdayaan masyarakat perlu adanya kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian. Sumodiningrat (2009) juga menjelaskan bahwa segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian

keterkaitan antar program pemberdayaan masyarakat mencakup keterkaitan misi, tujuan, dan pendekatan lintas sektor. Proses perubahan itu hanya dapat lestari dan berkelanjutan jika mampu digerakkan oleh masyarakat. Aparat dan pihak luar adalah fasilitator yang melakukan campur tangan minimum jika masyarakat belum mampu melakukan proses tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pada muaranya adalah bagaimana masyarakat yang bersangkutan melakukan daya upaya dengan menggunakan kemampuannya sendiri untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Mayer dan Louise (2008), menyebutkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat biasanya sejalan dengan paradigma "*bottom-up*", yang dicirikan tiga karakteristik sebagai pembeda dengan pendekatan "*top-down*", yaitu: (1) Memungkinkan masyarakat, untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting; (2) Memberi kekuatan pengambilan keputusan kepada masyarakat atas semua aspek program, termasuk disain, strategi, dan manajemen; dan (3) Mengukur keberhasilan bukan dalam hal perbaikan yang dapat diukur dalam hasil intervensi, melainkan secara kualitatif mengukur kontrol anggota masyarakat mengenai keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka.

Pemberdayaan dalam Perspektif Ekologi Manusia dan Ekologi Kelembagaan Masyarakat

Penggunaan pendekatan ekologi manusia dalam kajian pengembangan manusia, diperkenalkan Bronfenbrenner (1979), menyimpulkan bahwa anak selalu berkembang dalam konteks hubungan keluarga dan perkembangannya adalah hasil dari atribut genetik anak yang dikombinasikan dengan keluarga dekat mereka dan kemudian dengan komponen lingkungan lainnya. Berkaitan dengan kajian Bubbolz dan Sontag tentang ekologi keluarga, disebutkan bahwa model ekologi Bronfenbrenner bukan merupakan model proses keluarga atau pengembangan keluarga, tetapi menyediakan kerangka kerja untuk melihat cara-cara dimana proses dalam keluarga dipengaruhi oleh kondisi diluar keluarga dan lingkungan (Bubbolz dan Sontag, 1993: 424).

Pendekatan model ekologi kelembagaan masyarakat dikembangkan oleh Speer dan Hughey (1995), menyebutkan bahwa melalui mekanisme jaringan sebagai gambaran pengorganisasian masyarakat dan pengembangan kekuatan sosial. Organisasi masyarakat merupakan domain akumulasi dari kekuatan sosial yang diperlukan untuk pemberdayaan. Prinsip-prinsip ekologi yang dipakai sebagai kerangka analisis pemberdayaan, dari perspektif jaringan, organisasi masyarakat dan kekuatan sosial, merujuk pada: saling ketergantungan, siklus sumber daya, adaptasi, dan suksesi (Kelly, 1987, dalam Speer dan Hughey, 1995).

Lokalisasi

Lokalisasi pada suatu daerah yang merupakan tempat yang dikhususkan bagi pekerja seks komersial, atau WTS (Wanita Tuna Susila). Hasil observasi dan pengamatan lapangan, lokalisasi atau kompleks pelacuran terdiri atas rumah-rumah kecil ataupun menengah yang berlampu warna-warni, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Para germo sering di panggil dengan sebutan "mami" atau "papi". Tempat tersebut menyediakan tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat-alat berhias, juga tersedia gadis-gadis tipe karakter dan suku bangsa yang memiliki ketidaksamaan. Lokalisasi difokuskan kehalaman pelacuran atau prostitusi yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Maka

dapat dipahami bahwa lokalisasi tempat-tempat atau rumah-rumah para Pekerja Seks Komersil (PSK) guna menjajakan diri kepada laki-laki yang menggunakan jasanya (Bachtiar dan Purnomo, 2007).

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2014).

Informan Penelitian

Moleong (2014) mendefinisikan informan sebagai orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini penentuan sumber informasi atau informan pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya; (2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya; (3) Manajer Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya; dan (4) Pekerja atau Pengrajin Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini berdasarkan sumbernya menggunakan data primer. Dimana data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Data primer berasal dari data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (Kuncoro, 2013). Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014). Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2014).
2. Observasi
Dengan melakukan observasi, maka peneliti dapat meneliti dan mempelajari mengenai perilaku dan makna dari penelitian. Observasi terdiri dari observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan (Sugiyono, 2014).
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang (Sugiyono, 2014). Dokumen merupakan setiap bahan tertulis yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2014).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian data dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

IV. Hasil Dan Pembahasan

Model-model Pemberdayaan yang Diterapkan Kepada Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly

1. Keterlibatan mengidentifikasi isu penting

Pemberdayaan pada awalnya dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan juga penetapan jasa pelatih atau pendamping pelatihan yang dipilih untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Bapemas KB Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga didukung dengan peran seluruh perangkat masyarakat ex lokalisasi Dolly memiliki peran masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat, seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini.

"...Ya pada awal pemberdayaan diberikan sosialisasi dulu, sebelumnya Bapemas KB berperan dalam memilih jasa yang digunakan sebagai pelatih atau yang mendampingi pelatihan para masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sekitar Dolly ini."

Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberdayaan awalnya dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penetapan jasa pelatih atau pendamping pelatihan yang dipilih untuk memberikan pemberdayaan kepada UKM di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya. Pada tahapan awal terlihat bahwa Bapemas KB melakukan langkah-langkah persiapan dengan baik. Dalam hal ini Bapemas KB menentukan tenaga ahli seperti pelatih dan kader pendamping yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian, koordinasi yang dilakukan juga baik sehingga memudahkan dalam persiapan maupun pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Supomo selaku Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat ex lokalisasi Dolly memiliki ketrampilan. Kemudian Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa masyarakat masih banyak yang perlu diberdayakan karena kurangnya skill yang dimiliki. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat masyarakat, seperti terlihat dari hasil wawancara berikut ini.

"...Memang kalau dilihat masih sangat kurang skill mereka jadi perlu sekali pelatihan dari mulai produksi hingga nanti pemasaran produknya. Sebelumnya kami memang menyesuaikan pelatihan yang akan diberikan dengan minat masing-masing orang disana, kami taunya dengan survey"

menyebarkan angket begitu hingga kemudian kami memfokuskan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan minat mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menunjukkan bahwa pentingnya pelatihan yang diberikan dikarenakan masih sangat minimnya skill dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menyebarkan angket untuk melakukan survey kepada warga terdampak penutupan lokalisasi mengenai identitas mereka, profesi mereka dan keinginan mereka berdasarkan pilihan pelatihan yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya adalah memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik untuk melakukan kegiatan bersama.

2. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Setelah adanya penutupan lokalisasi Dolly, warga terdampak menjadi prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya. Perencanaan dalam program ini terkait visi dan misi program, sasaran program, rencana teknis dan operasional, strategi dan anggaran. Dalam perencanaan program terus dilakukan pemantauan dan dibicarakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) SKPD terkait untuk membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program. Pada awalnya, keputusan langsung diambil oleh Disperindag baik dari pemesanan, mencari konsumen, proses produksi, menjual, menawarkan sampai mengirim semua bantuan Disperindag. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan program, namun program pemerintah melibatkan perencanaan dari aktor kebijakan. Akan tetapi, secara tidak langsung masyarakat berpartisipasi mengutarakan keinginan kelompok kedepannya melalui kader pendamping maupun kelurahan atau kecamatan dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada melalui pertemuan rutin anggota kelompok. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan saran dan masukan namun juga meminta masyarakat untuk berfikir memecahkan masalah yang dihadapinya agar masyarakat dapat mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk mendorong partisipasi kelompok sasaran untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya.

Seiring berjalannya waktu dalam proses pemberdayaan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya mulai mengajarkan kepada warga ex lokalisasi Dolly untuk memasarkan produk yang dimiliki sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan kesempatan untuk warga ex lokalisasi Dolly agar mandiri namun tetap didukung dengan pendanaan diberikan oleh Dinas Koperasi namun masih dalam pantauan Disperindag. Pemerintah Kota Surabaya menyusun hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan pemberdayaan kepada masyarakat ex lokalisasi Dolly. Dalam tahap ini, menyusun hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan kepada masyarakat ex lokalisasi Dolly. Sejauh ini, Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya selama ini telah menerima bantuan 15 mesin singer, diberi fasilitas listrik dan juga bahan baku.

Tahap pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua langkah kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pelatihan dan monitoring pelatihan. Pada kegiatan pelaksanaan pelatihan yang diberikan dilaksanakan di Balai RW, pendopo kecamatan maupun kelurahan dimana penentuannya mendekati sasaran. Pada Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya sendiri mendapat pelatihan dari Bapemas KB sebanyak 3 kali dan dari Disperindag 3 kali. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga membantu pemasaran seperti pameran di Surabaya bahkan sampai NTT. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Arif selaku Manajer Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya dalam kutipan wawancara berikut ini.

“...Dalam pelaksanaan pelatihan ini dilakukan di Balai RW, pendopo kecamatan maupun kelurahan yang dilakukan baik oleh Bapemas KB maupun Disperindag masing-masing telah memberikan pelatihan sebanyak 3 kali.”



Gambar 1 : Hasil Produksi Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Arif selaku Manajer Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan hal serupa bahwa program pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat ex lokasi Dolly di tempat-tempat umum yang mendekati sasaran seperti Balai RW dan lain sebagainya. Untuk memastikan program pemberdayaan yang berjalan dengan lancar maka dilakukan monitoring oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang bertugas menjalankan program pemberdayaan. Selain itu, peran Pemerintah Kota Surabaya juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan pemasaran atau promosi pada hotel-hotel di Surabaya dan sekitarnya yang dimulai dari Hotel Bekisar hingga merambah ke hotel hotel besar lainnya bahkan hingga diluar Surabaya.

3. Pengukuran Keberhasilan melalui kontrol sasaran atas keputusan untuk kehidupannya

Tahapan ini terdiri dari kegiatan pasca pelatihan dimana dilakukan pendampingan kelompok dan juga monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terkait perkembangan kelompok, kemampuan kelompok dan bantuan bagi kelompok. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Arif selaku Manajer Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya, menyatakan bahwa skill yang dimiliki meningkat sehingga pengerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, sampai dilakukannya pemberdayaan juga terlihat adanya peningkatan omzet. Dalam pengukuran keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan bersifat pasif namun lebih cenderung memberikan kebebasan dalam mengembangkan bisnisnya masing-masing.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terlihat bahwa pengukuran keberhasilan yang dilakukan bersifat pasif cenderung memberikan kebebasan dalam mengembangkan bisnisnya masing-masing. Demikian juga untuk kehadiran ditempat pelatihan tidak ada sifat memaksa hanya menganjurkan warga memiliki kesadaran untuk hadir, mengingat pekerjaan yang diberikan bersifat borongan dengan fleksibilitas waktu. Dari hasil evaluasi juga ditemukan terdapat warga binaan yang tidak meneruskan dalam mengambil peluang dan cenderung mengambil profesi lain atau ada yang kembali ke prostitusi. Hal ini mendanakan masih perlunya pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran warga ex lokalisasi Dolly untuk berubah dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Kontribusi Ekologi Kelembagaan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Kepada Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly

1. Saling Ketergantungan (*Interdependency*)

Pada tingkat individu, saling ketergantungan ditunjukkan dengan bagaimana membangun hubungan antar satu individu satu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, prinsip ekologi saling ketergantungan terlihat dari adanya ketergantungan masyarakat ex lokalisasi Dolly terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketergantungan lainnya tidak hanya dari pihak masyarakat ex lokalisasi Dolly melainkan juga *stakeholder* yang menjadi pembeli produk UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya yaitu Hotel-hotel di Surabaya yang juga semakin diuntungkan karena harga jual produk alas kaki oleh Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya lebih murah dibandingkan dengan produsen lainnya yaitu dengan range harga antara Rp 1.500 – Rp 1.900, sedangkan beberapa produsen di tempat lain menawarkan harga yang lebih mahal yaitu Rp 2.200. Oleh karena itu, dapat dikatakan telah terjadi saling ketergantungan dalam proses pemberdayaan.

2. Perputaran Sumberdaya

Perputaran sumber daya dapat dikatakan cukup tinggi di awal-awal proses pemberdayaan berlangsung yang mana sebagian masyarakat ex lokalisasi Dolly yang memilih berhenti mengikuti pelatihan yang ada dikarenakan merasa bahwa menjalankan bisnis UKM belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi seperti ketika dahulu lokalisasi Dolly beroperasi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Arif selaku Manajer

Operasional Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya menunjukkan bahwa perputaran sumberdaya dalam proses pemberdayaan terjadi karena kurangnya ketertarikan sebagian warga ex lokalisasi Dolly untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan *skill* nya sehingga dapat memperbaiki perekonomiannya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wiwiek Widayati selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa dahulu sebagian warga kurang tertarik dengan program pemberdayaan sehingga pelatihan kurang banyak diikuti. Akan tetapi ketika terjadi peningkatan omzet penjualan terdapat warga ex lokalisasi Dolly yang kemudian datang kembali untuk mengikuti pelatihan yang diberikan, sehingga terdapat peningkatan peserta pelatihan.

3. Adaptasi

Pada proses pemberdayaan memang memerlukan adaptasi, yang mana pada awalnya perlu perjuangan mengingat kebiasaan awal sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly yang tidak sama dengan apa yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Terlebih dalam pelatihan yang membutuhkan waktu dan ketelatenan sehingga membuat sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly kurang dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga hal ini menjadi hambatan bagi jalannya proses pemberdayaan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pendekatan persuasif agar sebagian besar warga ex lokalisasi Dolly bersedia mengikuti program yang direncanakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat di daerah tersebut.

4. Suksesi

Perubahan lingkungan terjadi di lingkungan ex lokalisasi Dolly. Adanya peluang-peluang kesempatan kerja yang membuat mereka ada harapan untuk bisa hidup mandiri ataupun didalam binaan. Demikian juga memberikan pengarahan dan juga untuk bisa mandiri dalam pengembangan pasar yang ada.

Konsep dan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi Kelembagaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya

Temuan hasil analisis yang dilakukan pada proses pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah (UKM) di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya maka model pemberdayaan yang tepat dapat diberikan khususnya dengan memberikan pendampingan terpadu guna meningkatkan mentalitas para pengusaha UKM di Kawasan Ex lokalisasi Dolly Surabaya agar mampu menjalankan bisnisnya lebih baik lagi, mengingat masih ditemukannya masyarakat ex lokalisasi Dolly yang berhenti mengikuti pelatihan dan menjalankan bisnis melainkan kembali lagi kedalam bisnis prostitusi dikarenakan para masyarakat tersebut merasa bahwa bisnis UKM yang dijalankannya belum dapat memenuhi kebutuhannya seperti sebelumnya ketika masih beroperasinya lokalisasi Dolly. Dalam hal ini, perlu adanya peran pendampingan pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat dalam meningkatkan mentalitas dengan terus memberikan dukungan atau *support* agar para masyarakat di ex lokalisasi Dolly memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan bisnis UKM.

Selain itu masih ditemuinya kendala pada proses pemasaran yang bergantung pada Pemerintah Kota Surabaya maka perlu adanya pengarahan dan pemberian pengetahuan

terkait pemasaran produknya yang lebih baik lagi. Selain memberikan pelatihan juga membantu dari sisi pemasaran dengan memberikan kemudahan akses untuk merambah ke pemasaran kota-kota lain bahkan luar pulau. Kecamatan juga telah memberi kesempatan UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya mengajukan proposal pinjaman modal untuk mengembangkan bisnis UKM yang dijalkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terlihat bahwa pengusaha UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya memiliki jiwa kewirausahaan yang masih rendah terlihat dari kurang beraninya melakukan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan produknya dan juga keberanian untuk memasarkan produknya sendiri secara mandiri tanpa bantuan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini juga perlu didorong untuk peningkatan orientasi kewirausahaan sebagai kecenderungan warga untuk melakukan inovasi, proaktif dan mau mengambil risiko untuk memulai atau mengelola usaha agar dapat meningkatkan daya saing.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa model-model pemberdayaan masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan Ex lokasi Dolly Surabaya pada Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya awalnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau warga terdampak penutupan lokasi Dolly dan penetapan jasa pelatih atau pendamping pelatihan yang dipilih untuk memberikan pemberdayaan kepada UKM di Kawasan Ex lokasi Dolly Surabaya. Model pemberdayaan diberikan dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan skill yang dimiliki. Pemberdayaan juga dilakukan dengan menyesuaikan minat dan passion masyarakat yang ada. Dalam pemberdayaan juga menunjukkan peran Pemerintah yang sangat besar dalam pengambilan keputusan di awal baik dari pemesanan, mencari konsumen, proses produksi, menjual, menawarkan sampai mengirim semua bantuan Disperindag, namun tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi mengutarakan keinginan kelompok kedepannya melalui kader pendamping maupun kelurahan atau kecamatan dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada melalui pertemuan rutin anggota kelompok.

Selain itu, pemberdayaan Pemerintah juga memberikan bantuan 15 mesin singer, fasilitas listrik dan juga bahan baku. Kemudian dari Kecamatan juga menyarankan untuk pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa pinjaman modal usaha atau bantuan hibah. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua langkah kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pelatihan dan monitoring pelatihan. Pada Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya sendiri mendapat pelatihan dari Bapemas KB sebanyak 3 kali dan dari Disperindag 3 kali. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga membantu pemasaran seperti pameran di Surabaya bahkan sampai NTT.

Akan tetapi terlihat bahwa masih ada masyarakat yang masih belum memiliki mentalitas usaha yang kuat. Hal ini terlihat dari tidak mandiri ketika menjalankan usahanya sendiri tanpa pemberdayaan dari Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga terlihat dari kurangnya skill dalam memasarkan produknya sendiri, namun masih bergantung pada promosi-promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga kedepannya pemberdayaan diperlukan dalam meningkatkan mentalitas usaha

para pengusaha UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya agar memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Hal ini dapat diatasi dengan ditambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau bimbingan yang khusus mengajarkan tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin.

Saran

1. Diharapkan agar kedepannya dapat melakukan monitoring terhadap bantuan-bantuan yang diberikan agar digunakan tepat sasaran.
2. Diharapkan agar kedepannya dapat menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau bimbingan yang khusus mengajarkan tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin agar para pengusaha khususnya pengusaha UKM Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Mandiri Putat Jaya memiliki mentalitas dan jiwa kewirausahaan yang tinggi.
3. Kedepannya pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah (UKM) di Kawasan Eks Lokalisasi Dolly Surabaya perlu dibina untuk meningkatkan industri kreatif sebagai tolak ukur dengan adopsi ide-ide baru dalam jaringan sosial dalam produksi dan pemasaran produk. Perlu adanya peningkatan koleksi industri yang kreatif, tenaga kerja kreatif, dan komunitas kreatif. Hadirnya tenaga kerja ataupun entrepreneur kreatif dengan dibekali pengetahuan yang cukup agar warga binaan dolly mampu bertahan hidup saat sulit bahkan bisa berkembang. Kehadiran ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi

Daftar Referensi

- Bachtiar, R., dan E. Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus
- Bronfenbrenner U. 1979. *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Bubolz, M. M., & Sontag, M. S. 1993. *Human ecology theory*. In P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz (Eds.), *Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach* (pp. 419-450). New York, NY, US: Plenum Press.
- Cheung, C.K.; Chan, S.S.; Kwan, A.Y.; Ngan, R.M. 2005. Title *Quality of Life in Older Adults: Benefits from Caring Services in Hong Kong*. Source Social Indicators Research, Vol. 71, 29 1- 334
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fahrudin, A. (2011). *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Jönsson, Jessica H. 2010. *Beyond empowerment : Changing local communities*, International Social Work, 53 (3), pp. 393-406
- Kasmel, A & Andersen, PT 2011, 'Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla, Estonia' International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 8, no. 3, pp. 799-817
- Kelly, R. F. 1987. *Culture As Commodity: the Marketing of Cultural Objects and Cultural Experiences*. Advances in Consumer Research Volume 14, Pages 347-351
- Kuncoro. M. 2013. "*Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi*". Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mardikanto, T., dan P. Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mayer, Annette Braunack and Louise, Jennie 2008, The ethics of Community Empowerment: tensions in health promotion theory and practice, *Promotion & Education*, vol. 15, 3: pp. 5-8
- Moleong, L. J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan/ tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi di wilayah kota Surabaya
- Prasojo, Eko 2013, *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI tahun 2003 dalam literatur research dengan judul "Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta" di internet pada: <http://ekoprasojo.com/wpcontent/uploads/2013/12/PerspektifMembangunPartisipasi-Publik.pdf>
- Reininger, Beilida; Martin, David W.; Ross, Michael; Sinicrope, Pamela Smith and Dinh-Zarr, Tho, 1999. *Advancing The Theory and Measurement of Collective Empowerment: a Qualitative Study*, *Int'l. Quarterly of Community Education*, Vol. 25(3) 211-238, 2005-2006, Reprinted from: *Int'l. Quarterly of Community Health Education*, Vol. 19(4) 293-320, 1999-2000
- Sjafari, A. 2010. *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Kelompok*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No 2
- Soetomo. 2014. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Speer, Paul W. and Hughey, Joseph 1995. *Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power*. *American Journal of Community Psychology*, Vol. 23, No. 5, 1995: pp.729-748
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Sumodiningrat, G. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Sumpeno. W. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa: Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*. Banda Aceh: The World Bank.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Ryan Nugroho 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Elex Media Komputindo